

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2026
s/d Bulan Juni
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.478.495.800	66,18	66,18	0	1.633.355.900	65,9	1.556.811.736	62,81	3,09						
1.1	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.478.495.800	66,18	66,18	0	1.633.355.900	65,9	1.556.811.736	62,81	3,09						
																	1. Natal : 1 laporan dari 1 laporan 2. Nyepli : 1 laporan dari 1 laporan 3. Paskah : 1 laporan dari 1 laporan 4. Waisak : 1 laporan dari 1 laporan 5. Isra Mi'raj : 1 laporan dari 1 6. Nuzulul Qur'ân : 1 laporan dan 1 laporan 7. Maulid Nabi : 0 laporan dari 1 Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya fasilitasi perayaan Hari Natal di Kompleks Kepathihan Tahun 2026 sebagai bagian dari komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam mendukung keberagaman, toleransi, dan keharmonisan sosial di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi teknis dan administratif, penyediaan sarana pendukung kegiatan keagamaan, pengaturan pelaksanaan acara, serta sinergi dengan pihak terkait guna menciptakan suasana perayaan yang aman, tertib, nyaman, dan khidmat. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan nilai persaudaraan, inklusivitas, dan kerukunan antarumat beragama di DIY. Terlaksananya berbagai persiapan awal sejak awal tahun, yang diawali pada bulan Februari 2026 melalui rapat koordinasi Musabagah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat daerah, rapat koordinasi perayaan Hari Raya Nyepli, serta rapat koordinasi peringatan Isra Mi'raj dan Nuzulul Quran sebagai bentuk persiapan, sinkronisasi, dan penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan keagamaan lintas umat. Langkah persiapan tersebut diwujudkan dengan terlaksananya perayaan Hari Nyepli di Bangsal Kompleks Kepathihan pada bulan Maret 2026, serta terlaksananya Festival Keagamaan MTQ Tingkat Daerah di Sleman pada bulan April 2026 sebagai upaya mendukung penguatan kehidupan beragama, pelestarian nilai spiritual dan budaya, serta peningkatan harmoni sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlaksananya keberlanjutan rangkaian kegiatan keagamaan pada bulan Mei 2026 yang ditandai dengan fasilitasi perayaan Hari Paskah. Pada bulan yang sama, telah diselesaikan pula aspek administratif dan apresiasi keagamaan melalui pembagian uang pembinaan MTQ serta pelaksanaan perjalanan dinas (perjadin) terkait MTQ daerah. Sebagai bentuk akuntabilitas dan penyempurnaan program, pada bulan Mei ini juga telah dilaksanakan rapat evaluasi terhadap peringatan Isra Mi'raj guna mengukur ketercapaian dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang telah lalu.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisk			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1.1.1	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	2.478.495.800	66,18	66,18	0	1.633.355.900	65,9	1.556.811.736	62,81	3,09	Kesiapan mental dan teknis terus dimatangkan oleh Kafilah Musabagh Tilawatil Qur'an (MTQ) Daerah Istimewa Yogyakarta menjelang kompetisi di tingkat nasional. Salah satu perwakilan kafilah putra DIY, Izzin Faruq Z. Ramadan, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas fasilitas pemusatan latihan (training center) yang diselenggarakan secara intensif. Menurutny, pelaksanaan pembinaan kali ini berjalan sangat produktif dengan frekuensi latihan yang tinggi serta didukung oleh jajaran pelatih dan dewan hakim yang sangat kompeten di bidangnya. Melalui bimbingan yang terukur dan mendalam ini, para peserta dapat mengoptimalkan potensi diri secara maksimal. Segenap persiapan dini ini dilakukan secara matang demi mematok target tertinggi, yakni membawa pulang gelar juara dan memberikan hasil terbaik bagi mengharumkan nama Daerah Istimewa Yogyakarta di ajang MTQ Nasional.	https://drive.google.com/file/d/1Zahl1khOPPHVCiYP28CSU_nByLT71b/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	8. Hari Santri Nasional : 0 laporan dari 1 laporan 9. MTQ : 1 laporan dari 2 laporan 10. Utsawa Dharma Gita Daerah : 1 laporan dari 1 laporan 11. Festival Anak Soleh Indonesia : 0 laporan dari 1 laporan 12. Pespaparawi Nasional : 1 laporan dari 1 laporan	Tertindakannya serangkaian agenda keagamaan yang intensif sepanjang bulan Juni 2026. Kegiatan diawali dengan fasilitasi Perayaan Waisak di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud nyata dukungan terhadap khidmatnya ibadah umat Buddha, yang kemudian diikuti dengan pemberangkatan serta pengiriman Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pespaparawi) Tingkat Nasional XIV. Sebagai penutup agenda bulan ini, pada akhir Juni telah dilaksanakan Perayaan Utsawa Dharma Gita (UDG) tingkat daerah. Seluruh rangkaian kegiatan di bulan Juni ini difokuskan pada manajemen fasilitasi, pemenuhan logistik kontingen, koordinasi keamanan, serta pendampingan teknis guna memastikan seluruh proses berjalan khidmat, tertib, sekaligus memperkokoh ekosistem kerukunan antarumat beragama di DIY. Faktor Penghambat: Terdapat kendala eksternal berupa kondisi kesehatan pelatih yang menurun, sehingga yang bersangkutan harus dipulangkan kembali ke Yogyakarta karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan dan tidak dapat mengambil risiko untuk tetap berangkat ke Papua Barat dalam rangka mendampingi kontingen Pespaparawi. Selebihnya efisiensi dikarenakan adanya selisih harga perolehan dengan SHBI. Faktor Pendukung: 1. Komitmen Pemerintah Daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam mendukung kehidupan beragama, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama diwujudkan melalui fasilitasi pelaksanaan Perayaan Hari Natal, Hari Nyeipi, Hari Paskah, serta Festival Musabagh Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Daerah Tahun 2026, Waisak, serta Pespaparawi. 2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan meliputi instansi pemerintah, panitia pelaksana, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan stakeholder terkait yang dibangun melalui rapat koordinasi MTQ, Hari Raya Nyeipi, Iera Midé™raj, Nazulul Quran, dan kegiatan keagamaan lainnya sehingga mendukung kesiapan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. 3. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola administrasi yang tertib, serta perencanaan kegiatan yang terstruktur mendukung pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan, penyelesaian administrasi pembinaan MTQ, serta pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. 4. Dukungan anggaran serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung memungkinkan terselenggaranya kegiatan keagamaan, forum koordinasi, festival keagamaan tingkat daerah, serta berbagai kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan secara optimal. 5. Partisipasi aktif masyarakat, lembaga keagamaan, dan tokoh agama memberikan kontribusi positif dalam menyukseskan kegiatan, memperkuat nilai persaudaraan, toleransi, inklusivitas, serta menjaga harmoni sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk melalui rapat evaluasi peringatan Isra Mi'raj dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya, menjadi sarana perbaikan berkelanjutan guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, nyaman, khidmat, serta memberikan manfaat bagi penguatan kerukunan umat beragama.
2	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	353.814.900	55,89	55,89	0	197.572.000	55,84	98.503.968	27,84	28						
2.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.989.000	100	100	0	2.989.000	100	2.921.000	97,73	2,27						
2.1.1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000	100	100	0	2.400.000	100	2.400.000	100	0	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-ad-Bs6Pxf0RgZlK9t9nmpfTxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Perjanjian Kinerja 2026 : 1 dokumen dari 1 dokumen 2. Forum OPD : 1 kegiatan dari 1 kegiatan 3. Perubahan Renja 2026 : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Renja 2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Forum OPD sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam rangka penyiapan program dan prioritas pembangunan daerah agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai dokumen komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi acuan utama pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dokumen penyesuaian perencanaan yang mengakomodasi dinamika dan kebutuhan pelaksanaan program pada tahun berjalan. Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan awal yang menjadi dasar arah pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Faktor Penghambat: Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan, dan seluruh anggaran telah direalisasikan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan serta kebutuhan kegiatan. Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY serta koordinasi internal antarunit kerja mendukung kelancaran pengumpulan data dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah secara terintegrasi. 2. Ketersediaan data, informasi, dan SDM yang kompeten di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mendukung penyusunan program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan. 3. Sinergi dan komunikasi yang baik antarbidang di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY serta partisipasi aktif pemangku kepentingan mendukung efektivitas pembahasan dan penyesuaian dokumen perencanaan. 4. Ketersediaan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mencukupi untuk mendukung pelaksanaan Forum OPD, termasuk belanja makanan dan minuman rapat serta honorarium narasumber, moderator, pembahas, pembawa acara, dan panitia. 5. Perencanaan kegiatan yang terstruktur serta dukungan administrasi dan tata kelola yang tertib di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mendukung proses validasi dan finalisasi dokumen sesuai jadwal dan ketentuan. 6. Kerja sama yang baik dengan pihak vendor mendukung kelancaran penyediaan kebutuhan kegiatan sehingga pelaksanaan Forum OPD dapat berjalan tertib dan sesuai jadwal.
																	1. Dokumen RKA 2027 : 1 dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.2	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	269.000	100	100	0	269.000	100	236.000	87,73	12,27	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4 (Empat) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-8s6P3ufoRgUkIKtunpmfTxDr/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	2. Dokumen RKA Perubahan 2026 : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. DPPA 2026 : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. DPA 2027 : 0 dokumen dari 1 dokumen Faktor Penghambat: Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan, dan seluruh anggaran telah direalisasikan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan. Terdapat sedikit selisih anggaran yang disebabkan oleh perbedaan antara harga perolehan dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mendukung kelancaran persiapan koordinasi dan penyusunan DPA SKPD secara terintegrasi. 2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antarbidang mendukung penyelesaian prioritas program dan kegiatan perangkat daerah. 3. Ketersediaan data dan informasi dari berbagai unit kerja mendukung proses penyusunan dokumen awal DPA-SKPD secara tepat dan terarah. 4. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten mendukung kelancaran proses koordinasi, validasi, dan penyusunan dokumen perencanaan. 5. Ketersediaan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan DPA-SKPD. 6. Terealisasinya belanja alat/bahan kegiatan kantor berupa bahan komputer mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi serta penyusunan dokumen. 7. Dukungan administrasi dan perencanaan kegiatan yang tertib mendukung seluruh tahapan penyusunan DPA-SKPD berjalan sesuai jadwal dan ketentuan.	Tersusunnya Dokumen RKA Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2027, serta sebagai instrumen penjabaran arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam rencana kerja yang lebih operasional. Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan Tahun 2026 sebagai bentuk penyesuaian rencana anggaran terhadap dinamika pelaksanaan program dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah pada tahun berjalan, sehingga tetap selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Tersusunnya Dokumen DPPA Tahun 2026 sebagai dokumen penetapan perubahan pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar penguatan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah pada tahun 2026.
												Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang				1. Bahan LPPD DIY 2025 : 1 laporan dari 1 laporan 2. Bahan LKPI Gubernur 2025 : 1 laporan dari 1 laporan 3. LKJIP 2025 : 1 laporan dari 1 laporan 4. Dokumen MONEV Program Kegiatan Triwulan : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Bahan LPPD DIY Tahun 2025 sebagai materi pendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara komprehensif dan terukur. Tersusunnya Bahan LKPI Gubernur Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Tersusunnya LKJIP Tahun 2025 sebagai laporan kinerja instansi pemerintah yang memuat capaian sasaran strategis dan indikator kinerja perangkat daerah secara sistematis dan akuntabel.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.1.3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	320.000	100	100	0	320.000	100	285.000	89,06	10,94	diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4C. Ditunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6P1xfoRgZlIK9tsnmpTxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha		Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 sebagai hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan perangkat daerah pada periode triwulan kedua, yang digunakan sebagai dasar identifikasi capaian, permasalahan, serta tindak lanjut perbaikan pelaksanaan program pada periode berikutnya. Faktor Penghambat: Secara umum tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala teknis yang bersifat situasional seperti penyesuaian jadwal lintas perangkat daerah serta dinamika kebutuhan data yang memerlukan proses klarifikasi dan verifikasi tambahan. Di sisi lain, terdapat efisiensi anggaran yang ditunjukkan oleh adanya selisih antara harga perolehan dengan Standar Harga Barang/Jasa (SHBJ), yang mencerminkan adanya optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan. Faktor Pendukung: Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan pedoman perencanaan dan penganggaran yang jelas, koordinasi yang baik antar perangkat daerah, serta dukungan data kinerja yang relatif lengkap dan mutakhir. Selain itu, adanya komitmen dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi turut memperlancar pelaksanaan kegiatan. Dukungan sistem informasi perencanaan dan pelaporan juga membantu meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen serta akurasi data yang digunakan.
2.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.913.200	63,58	63,58	0	4.393.200	63,55	3.881.160	56,14	7,41						
2.2.1	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.360.000	53,02	53,02	0	2.840.000	52,99	2.805.000	52,33	0,66	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4C. Ditunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6P1xfoRgZlIK9tsnmpTxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD menandai tahap awal Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memastikan seluruh administrasi kegiatan SKPD tersusun rapi, terdokumentasi dengan baik, dan siap untuk dilakukan pengujian atau verifikasi. Persiapan ini mencakup koordinasi antarunit kerja, pengumpulan dokumen pendukung, serta penyusunan bahan dan checklist verifikasi untuk memudahkan proses selanjutnya. Langkah ini juga menekankan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG), dengan memastikan partisipasi pegawai perempuan dan laki-laki dalam proses penatausahaan dan verifikasi sehingga setiap tahapan dilaksanakan secara inklusif dan transparan. Dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut, juga telah terealisasi belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan serta belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor berupa kertas dan cover, yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen keuangan, sehingga seluruh proses dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Pembelanjaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran yang disebabkan adanya selisih antara harga perolehan barang dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												kuualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.					1. Koordinasi yang baik antar staf dan unit kerja di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam proses penatausahaan dan verifikasi keuangan. 2. Dukungan sumber daya manusia yang memahami administrasi dan pengelolaan keuangan SKPD. 3. Ketersediaan dokumen pendukung dan data administrasi keuangan yang lengkap untuk proses pengujian/verifikasi. 4. Tersedianya belanja honorarium pengelola keuangan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab keuangan. 5. Tersedianya alat/bahan kantor seperti kertas dan cover untuk mendukung penyusunan serta pengelolaan dokumen keuangan. 6. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.2.2	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	320.000	100	100	0	320.000	100	285.000	89,06	10,94	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6P1xf0RgzlIK9TsnpmFxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Laporan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat Triwulan II Tahun 2025 menandai terlaksananya proses pelaporan keuangan secara berkala yang berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan laporan ini merupakan hasil koordinasi antarunit kerja dalam rangka pengumpulan, verifikasi, dan konsolidasi data keuangan sebagai dasar penyajian informasi kinerja keuangan perangkat daerah pada periode Triwulan II. Proses tersebut juga didukung oleh tersedianya bahan administrasi dan kelengkapan dokumen yang diperlukan sehingga penyajian laporan dapat dilakukan secara lebih sistematis, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Pembelanjaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran yang disebabkan adanya selisih antara harga perolehan barang dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tertib dan akuntabel 2. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antarunit kerja dalam proses pengumpulan data dan penyusunan laporan keuangan 3. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan keuangan 4. Ketersediaan data dan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat sebagai dasar rekonsiliasi dan finalisasi laporan 5. Ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 6. Terealisasinya belanja alat dan bahan kegiatan kantor berupa kertas dan cover untuk mendukung penyusunan dokumen laporan keuangan 7. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi yang memadai dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan 8. Perencanaan kegiatan yang terstruktur sehingga tahapan koordinasi, rekonsiliasi, dan finalisasi laporan dapat berjalan sesuai jadwal

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	9. Dukungan tata kelola administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai ketentuan yang berlaku 10. Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam proses penyusunan laporan keuangan guna memastikan ketepatan, kelengkapan, dan akuntabilitas dokumen keuangan SKPD
2.2.3	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.233.200	100	100	0	1.233.200	100	791.160	64,16	35,84	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4 (Empat) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0Rg2llK9tsnmpTxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa proses pelaporan keuangan telah dilaksanakan secara berkala, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan laporan ini merupakan hasil koordinasi antarunit kerja dalam rangka pengumpulan, verifikasi, dan konsolidasi data keuangan sebagai dasar penyajian informasi keuangan perangkat daerah pada periode Triwulan I dan Triwulan II. Dalam proses penyusunannya, telah dilakukan penyajian data dan dokumen pendukung secara berjenjang, sehingga seluruh informasi keuangan dapat direkonsiliasi dan disajikan secara lebih akurat, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan ketersediaan bahan administrasi seperti alat tulis kantor, kertas, dan cover turut membantu kelancaran pengelolaan dan penataan dokumen laporan, sehingga proses penyusunan laporan keuangan sampai Triwulan II dapat berjalan dengan lebih tertib dan akuntabel. Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Pembelanjaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran pada pembelian alat tulis dan perlengkapan kantor yang disebabkan adanya selisih antara harga perolehan barang dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHB). Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung penyusunan laporan keuangan secara berkala dan akuntabel 2. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antarunit kerja dalam proses pengumpulan data dan penyusunan laporan keuangan 3. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan SKPD 4. Ketersediaan data dan dokumen pendukung yang lengkap dan akurat sebagai dasar rekonsiliasi laporan keuangan 5. Ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran 6. Terealisasinya belanja alat tulis kantor serta kertas dan cover untuk mendukung penyusunan dan pengelolaan dokumen laporan keuangan 7. Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi yang memadai dalam mendukung proses pelaporan keuangan 8. Perencanaan kegiatan yang terstruktur sehingga tahapan penyusunan, rekonsiliasi, dan penyajian laporan dapat berjalan sesuai jadwal 9. Dukungan tata kelola administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai ketentuan yang berlaku 10. Monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan ketepatan, kelengkapan, dan akuntabilitas laporan keuangan SKPD
2.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.385.000	57,16	57,16	0	4.785.000	57,07	4.573.500	54,54	2,53						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3.1	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.385.000	57,16	57,16	0	4.785.000	57,07	4.573.500	54,54	2,53	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4 (C). Menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pxf0RgzllK9tsnmpTxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD menandai langkah awal Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pencairan uang persediaan mengalami keterlambatan akibat adanya kebijakan baru di awal tahun terkait koordinasi dan konsolidasi perangkat daerah (KKPD), yang berdampak pada alur penyediaan dana untuk kegiatan awal tahun. Meskipun demikian, langkah koordinasi dan penyesuaian prosedur telah dilakukan agar proses pencairan dapat segera berjalan dan mendukung kelancaran pelaksanaan program. Sejalan dengan itu, juga telah terealisasi belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, serta belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor berupa alat tulis kantor, kertas, dan cover yang digunakan dalam mendukung proses administrasi penatausahaan BMD, sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan lebih tertib, rapi, dan akuntabel. Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Pembelanjaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran yang disebabkan adanya selisih antara harga perolehan barang dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antarunit kerja serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam proses administrasi dan pengelolaan aset daerah. 3. Ketersediaan data, dokumen pendukung, serta tata kelola administrasi dan pelaporan yang tertib untuk mendukung pencatatan dan penatausahaan BMD secara sistematis. 4. Tersedianya anggaran, dukungan pencairan dana bertahap, serta realisasi belanja jasa pengelolaan BMD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 5. Tersedianya sarana dan prasarana administrasi, termasuk alat tulis kantor, kertas, dan cover dokumen, dalam mendukung penyusunan dan pengelolaan dokumen penatausahaan BMD.
2.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.358.100	61,88	61,88	0	102.246.300	61,83	38.707.280	23,41	38,40						Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.4.1	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.795.000	100	100	0	4.795.000	100	4.795.000	100	0	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4C. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pxf0RgZlIK9tsnpMtxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 1 paket dari 1 paket	Tertakannya persiapan pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor menunjukkan komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung kelancaran operasional perkantoran melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kondisi penerangan di lingkungan kantor tetap optimal sehingga dapat mendukung kenyamanan, keamanan, dan efektivitas pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi. Dalam pelaksanaannya, telah direalisasikan pembelian berupa bohlam lampu sebagai penunjang kebutuhan penerangan di lingkungan kantor, sehingga kebutuhan dasar operasional perkantoran dapat terpenuhi secara baik dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Pembelian dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung kelancaran operasional perkantoran melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antarunit kerja dalam proses persiapan pengadaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor 3. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran 4. Ketersediaan anggaran yang mendukung pengadaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 5. Perencanaan kebutuhan sarana penerangan yang dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan operasional kantor 6. Terealisasinya pembelian bohlam lampu sebagai penunjang kebutuhan penerangan di lingkungan kantor 7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja 8. Dukungan tata kelola administrasi yang tertib dalam proses pengadaan dan pengelolaan barang kebutuhan kantor 9. Monitoring dan pemeliharaan fasilitas penerangan secara berkala guna menjaga efektivitas operasional perkantoran 10. Dukungan lingkungan kerja yang kondusif sehingga pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan
												Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada					Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Tertakannya persiapan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor menunjukkan komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi dan operasional perkantoran melalui pemenuhan kebutuhan sarana kerja yang memadai. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan, penyusunan dokumen, serta kegiatan administrasi dapat berjalan secara tertib, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, telah dilaksanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan kertas cover sebagai penunjang kebutuhan administrasi perkantoran, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.4.2	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.199.100	27,34	27,34	0	2.786.300	27,32	2.299.998	22,55	4,77	menjaga ketersediaan kebutuhan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4C dan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0RgZlIK9tsnmpfTxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Peralatan dan Perlengkapan Kantor : paket dari 1 paket	Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Pembelian dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran yang disebabkan adanya selisih antara harga perolehan barang dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan komunikasi yang baik antarunit kerja dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 2. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran. 3. Ketersediaan anggaran yang mendukung pengadaan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan dan prioritas operasional. 4. Perencanaan kebutuhan sarana kerja yang dilakukan secara terukur guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. 5. Terealisasinya pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan kertas cover untuk mendukung administrasi serta pengelolaan dokumen perkantoran. 6. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam menunjang pelayanan dan kegiatan administrasi perkantoran. 7. Dukungan tata kelola administrasi yang terbit dalam proses pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor. 8. Monitoring dan evaluasi kebutuhan perlengkapan kantor yang dilakukan secara berkala guna mendukung kelancaran operasional Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.
2.4.3	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.556.000	100	100	0	2.556.000	100	2.555.976	100	0	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4C dan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0RgZlIK9tsnmpfTxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Peralatan Rumah Tangga : 1 paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga menunjukkan komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kerapian lingkungan kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan aktivitas perkantoran. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan suasana kerja yang bersih, sehat, dan nyaman sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta produktivitas kerja pegawai. Dalam pelaksanaannya, telah direalisasikan pembelian kebutuhan berupa tisu dan pengharum ruangan sebagai penunjang kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja, sehingga kondisi sarana pendukung perkantoran dapat terpelihara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Pembelian dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran yang disebabkan adanya selisih antara harga perolehan barang dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kerapian lingkungan kerja. 2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antarunit kerja dalam pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga perkantoran 3. Dukungan sumber daya manusia yang peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja 4. Ketersediaan anggaran yang mendukung penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.					5. Perencanaan kebutuhan perlengkapan kebersihan dan kenyamanan kerja yang dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan kantor 6. Terealisasinya pembelanjaan itu sebagai penunjang kebersihan dan kebutuhan operasional perkantoran 7. Terealisasinya pembelanjaan pengharum ruangan untuk mendukung kenyamanan lingkungan kerja 8. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat 9. Dukungan tata kelola administrasi yang tertib dalam proses pengadaan dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga kantor 10. Monitoring dan pemeliharaan lingkungan kerja secara berkala guna menjaga kenyamanan serta mendukung efektivitas dan produktivitas kerja pegawai
2.4.4	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.800.000	78,16	78,16	0	13.125.000	78,13	11.917.706	70,94	7,19	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4.00 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-ad-86d9JwfoRgUikl3KsnpMfxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Barang Cetak dan Penggandaan paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan menandai kesiapan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung kebutuhan dokumen administrasi dan kegiatan perkantoran secara efektif dan tepat waktu. Persiapan ini mencakup identifikasi kebutuhan bahan cetak, koordinasi pelaksanaan penggandaan dokumen, serta penyusunan bahan yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan administrasi dan pelayanan. Dalam mendukung kelancaran proses tersebut, telah terealisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor berupa bahan cetak, termasuk pencetakan map OPD Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, sehingga seluruh kegiatan pencetakan dan penggandaan dapat berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Faktor Penghambat: Realisasi belanja penyediaan barang cetak dan penggandaan telah terlaksana sepenuhnya sesuai kebutuhan operasional perkantoran. Pelaksanaan kegiatan ini juga menghasilkan efisiensi anggaran yang berasal dari selisih antara harga perolehan dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih optimal dan akuntabel. Faktor Pendukung: 1. Dukungan administrasi perkantoran yang tertib melalui penyediaan barang cetak dan penggandaan dokumen 2. Koordinasi yang baik antarunit kerja dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan bahan cetak 3. Ketersediaan anggaran yang mendukung kegiatan pencetakan dan penggandaan dokumen perkantoran 4. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan bahan cetak 5. Terealisasinya pencetakan dokumen dan map OPD Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai penunjang administrasi organisasi 6. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang proses pencetakan dan penggandaan dokumen 7. Monitoring dan pengendalian penggunaan barang cetak secara berkala guna mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan perkantoran
																	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.4.5	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.842.000	100	100	0	1.842.000	100	1.680.000	91,21	8,79	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4 (Sangat Baik) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0Rg3lllK9tsnmpmFxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan : 1 dokumen dari 1 dokumen	Terlaksananya langganan jurnal/surat kabar/majalah menunjukkan komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung kebutuhan informasi, referensi, dan bahan pemberitaan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan akses informasi yang aktual dan relevan bagi kebutuhan administrasi, koordinasi, serta pengambilan kebijakan di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaannya, langganan jurnal/surat kabar/majalah telah direalisasikan pada Januari 2026 untuk kebutuhan selama satu tahun, sehingga ketersediaan sumber informasi dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan mendukung kelancaran operasional perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Pembelanjaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran yang disebabkan adanya selisih antara harga perolehan barang dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung kebutuhan informasi dan referensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 2. Koordinasi dan komunikasi yang baik dalam proses identifikasi kebutuhan informasi dan bahan pemberitaan di lingkungan kerja 3. Dukungan sumber daya manusia yang aktif memanfaatkan informasi sebagai bahan koordinasi, administrasi, dan pengambilan kebijakan 4. Ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan langganan jurnal, surat kabar, dan majalah 5. Perencanaan kebutuhan sumber informasi yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi 6. Terealisasinya langganan jurnal, surat kabar, dan majalah sejak Januari 2026 untuk kebutuhan selama satu tahun 7. Ketersediaan akses informasi yang aktual dan relevan guna mendukung kelancaran operasional perkantoran 8. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pemanfaatan bahan informasi dan referensi di lingkungan kerja 9. Dukungan tata kelola administrasi yang tertib dalam proses pengadaan dan pengelolaan layanan langganan informasi 10. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber informasi secara berkala guna memastikan efektivitas dukungan informasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi
																	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.4.6	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.166.000	59,78	59,78	0	77.142.000	59,72	15.458.600	11,97	47,76	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4.00. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0RgZlIKtSnpmfTxDr/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : laporan dari 1 laporan	Dengan demikian, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD telah mendukung terwujudnya sinergi antarperangkat daerah dan penguatan kepentingan serta memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor Penghambat: Selisih realisasi dan anggaran terjadi karena kebutuhan perjalanan dinas dan rapat koordinasi tidak dapat diprediksi secara pasti sepenuhnya, di awal tahun. Oleh karena itu, anggaran dialokasikan secara antisipatif, sementara realisasi disesuaikan dengan kebutuhan aktual selama pelaksanaan kegiatan. Faktor Pendukung: 1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan penyaluran program menjadi faktor utama dalam mendukung terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara efektif.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar perangkat daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya mendukung kelancaran pembahasan program, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan rencana tindak lanjut secara terpadu. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis secara berkala menjadi sarana konsolidasi internal yang efektif dalam mendukung perencanaan, pengendalian, pemantauan, serta penyelesaian berbagai permasalahan dan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. 4. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola administrasi yang tertib, serta ketersediaan anggaran dan sarana pendukung kegiatan memungkinkan pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi, dan persiapan program strategis daerah berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. 5. Sinergi dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, termasuk instansi terkait dan pengelola layanan keagamaan, mendukung kelancaran koordinasi persiapan operasional embarkasi haji YIA serta berbagai agenda strategis Biro Kesejahteraan Rakyat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara efektif, tertib, dan optimal.
2.5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.148.000	100	100	0	12.148.000	100	10.106.828	83,2	16,8						
2.5.1	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	100	100	0	6.000.000	100	5.000.000	83,33	16,67	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4 (Sangat Baik) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0RgzllK9tsnpmTxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan penyediaan jasa surat menyurat menandai kesiapan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung kelancaran administrasi perkantoran, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi dokumen secara tertib dan tepat waktu. Persiapan ini mencakup pengaturan alur surat masuk dan keluar, penyiapan dokumen, serta koordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengiriman dan penerimaan surat. Seluruh proses tersebut dilaksanakan untuk memastikan kegiatan surat menyurat dapat berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, hingga Triwulan II telah dilaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat secara berkelanjutan melalui penerimaan, pencatatan, penelaahan, pendistribusian, dan pengarsipan surat masuk serta penyiapan, penomoran, pengiriman, dan pendokumentasian surat keluar. Selain itu, dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut surat dan penyampaian dokumen kepada perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan surat menyurat juga didukung dengan penataan administrasi dan pengarsipan dokumen secara berkala guna memastikan ketertelusuran dokumen serta tertib administrasi perkantoran. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, penyelenggaraan jasa surat menyurat telah mendukung kelancaran komunikasi kedinasan, ketepatan penyampaian informasi, serta tertib administrasi di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan berkesinambungan Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.					realisasi belanja material telah terlaksana sepenuhnya sesuai kebutuhan operasional. Pelaksanaan kegiatan ini juga menghasilkan efisiensi anggaran yang berasal dari selisih antara harga pembelian dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih optimal dan akuntabel. Faktor Pendukung: 1. Dukungan administrasi perkantoran yang tertib dalam pelaksanaan layanan surat menyurat dan penggunaan materi kerja dalam proses pengelolaan dan distribusi dokumen bermaterai 3. Ketersediaan materi sebagai penunjang kelancaran administrasi dan legalitas dokumen kedinasan 4. Dukungan anggaran yang memadai sehingga kebutuhan belanja materi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan operasional 5. Pengelolaan administrasi dan penggunaan materi yang terencana serta terkontrol sehingga mendukung efektivitas pelayanan perkantoran
2.5.2	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.148.000	100	100	0	6.148.000	100	5.106.828	83,06	16,94	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4.00 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0RgzllKt3nmpfTxDr/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik : 1 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, yang telah direalisasikan melalui pembelian langganan Zoom Video Conference sebagai penunjang kebutuhan komunikasi dan koordinasi secara daring. Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran terjadi karena adanya selisih antara harga perolehan barang/jasa dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang digunakan sebagai dasar penganggaran. Faktor Pendukung: 1. Tim pelaksana kompeten dan memahami tugasnya dengan baik. 2. Sarana dan dukungan teknologi informasi memadai. 3. Anggaran tersedia sesuai kebutuhan kegiatan. 4. Koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan baik.
2.6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.021.600	45	45	0	71.010.500	44,94	38.314.200	24,25	20,69						Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan menandai kesiapan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memastikan operasional kendaraan dinas tetap optimal, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persiapan ini mencakup pendataan kendaraan, penjadwalan pemeliharaan, serta koordinasi terkait pemenuhan kewajiban administrasi kendaraan. Seluruh rangkaian persiapan tersebut dilaksanakan untuk memastikan operasional kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.6.1	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.057.000	45,72	45,72	0	14.638.500	45,66	9.230.000	28,79	16,87	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan <i>kecukupan</i> menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Artinya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0RgzllfK9tsnmpfTxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 unit dari 1 unit	Selanjutnya, hingga Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pemeriksaan kondisi kendaraan dinas secara berkala yang meliputi pengecekan fungsi mesin, sistem kelistrakan, kondisi ban, sistem pengereman, serta pemeriksaan komponen pendukung lainnya guna memastikan kendaraan berada dalam kondisi laik operasional. Selain itu, dilakukan penggantian komponen yang mengalami penurunan fungsi, pemantauan penggunaan kendaraan dinas, serta penataan dan pemutakhiran dokumen administrasi kendaraan, termasuk pemenuhan kewajiban administrasi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan juga mencakup pengendalian dan monitoring kondisi kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan kegiatan kedinasan lainnya sehingga mobilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat dapat berjalan secara lancar dan tanpa hambatan. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan telah mendukung terjalannya kondisi kendaraan dinas yang andal, aman, dan siap digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan berkesinambungan. Faktor Penghambat: Faktor penghambat dalam pelaksanaan subkegiatan ini yaitu tingginya kebutuhan biaya pemeliharaan kendaraan dinas karena sebagian kendaraan operasional telah berusia di atas 13 tahun, sehingga memerlukan perawatan dan penggantian komponen secara lebih intensif sesuai kondisi dan kebutuhan kendaraan. Faktor Pendukung: 1. Dukungan pengelolaan kendaraan dinas yang tertib melalui koordinasi, administrasi, dan perencanaan pemeliharaan secara berkala 2. Ketersediaan anggaran untuk mendukung operasional, pemeliharaan, pembayaran pajak, bahan bakar, pelumas, dan suku cadang kendaraan dinas 3. Dukungan sumber daya manusia serta sarana pendukung dalam menjaga kelayakan dan kesiapan kendaraan dinas operasional 4. Monitoring dan evaluasi kondisi kendaraan secara berkala guna memastikan kelancaran, keamanan, dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan
																	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan menandai kesiapan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memastikan kendaraan operasional selalu dalam kondisi prima, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Persiapan ini mencakup pendataan kendaraan, penjadwalan pemeliharaan, serta pengurusan administrasi pajak dan perizinan guna mendukung kelancaran mobilitas kegiatan lapangan. Seluruh rangkaian persiapan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kendaraan dinas operasional dapat digunakan secara optimal dan mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.6.2	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.968.600	48,82	48,82	0	37.528.000	48,76	12.372.200	16,07	32,89	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4. Menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0RgzlIK9t5nmpmFtxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : unit dari 5 unit	Selanjutnya, hingga Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara berkala, meliputi pengecekan kondisi mesin, sistem pengereman, kelistrikan, ban, dan komponen pendukung lainnya guna memastikan kendaraan tetap dalam kondisi laik operasional. Selain itu, dilakukan pemantauan penggunaan kendaraan, penataan dan pemutakhiran data administrasi kendaraan, serta penyelesaian administrasi pajak dan perizinan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Kendaraan dinas operasional juga dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, monitoring, fasilitasi, verifikasi lapangan, pendampingan kegiatan, dan tugas kedinasan lainnya di bidang kesejahteraan rakyat sehingga mobilitas pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara lancar, efektif, dan tepat waktu. Faktor Penghambat: Tidak ada kendala berarti, direalisasikan sesuai dengan kebutuhan penggantian suku cadang atau kerusakan dengan tantangan usia kendaraan diatas 15 tahun yang membutuhkan perawatan ekstra. Faktor Pendukung: 1. Dukungan pengelolaan kendaraan dinas operasional yang tertib melalui koordinasi, administrasi, dan perencanaan pemeliharaan secara berkala 2. Ketersediaan anggaran untuk mendukung pemeliharaan, pembayaran pajak, perizinan, bahan bakar, dan pelumas kendaraan dinas lapangan 3. Dukungan sumber daya manusia serta sarana pendukung dalam menjaga kelayakan dan kesiapan operasional kendaraan dinas 4. Terealisasinya pemenuhan kebutuhan operasional kendaraan dinas guna mendukung mobilitas dan kelancaran pelaksanaan tugas lapangan 5. Monitoring dan evaluasi kondisi kendaraan secara berkala untuk mendukung efektivitas, keamanan, dan efisiensi pelaksanaan tugas kedinasan di lapangan
2.6.3	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.714.000	100	100	0	2.714.000	100	2.420.000	89,17	10,83	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4. Menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0RgzlIK9t5nmpmFtxDt-r/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Mebel yang Dipelihara : unit dari 6 unit	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan Pemeliharaan Mebel menunjukkan komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana perkantoran agar tetap layak digunakan serta mendukung kenyamanan lingkungan kerja. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan mebel perkantoran tetap terpelihara dengan baik sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pelayanan administrasi, dan aktivitas kerja sehari-hari. Persiapan pemeliharaan mencakup identifikasi kondisi mebel, perencanaan kebutuhan pemeliharaan, serta penyiapan langkah tindak lanjut guna menjaga kualitas dan fungsi peralatan perkantoran secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti. Belum terdapat anggaran kas yang harus direalisasikan untuk pemeliharaan mebel. Faktor Pendukung: 1. Dukungan koordinasi dan komunikasi antarunit kerja dalam tahap persiapan identifikasi kebutuhan pemeliharaan mebel perkantoran 2. Ketersediaan data dan informasi kondisi mebel sebagai dasar perencanaan awal pemeliharaan secara tepat dan terarah

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
												menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.					3. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan pemeliharaan sarana perkantoran 4. Kesiapan administrasi dan tata kelola yang tertib dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran pemeliharaan mebel 5. Dukungan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung proses persiapan pemeliharaan agar berjalan efektif dan terstruktur.
2.6.4	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.222.000	32,62	32,62	0	10.506.000	32,61	9.252.000	28,71	39	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4 dan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-ad-Bs0PwfoRgUjK9tunpM7xDT-/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 15 unit dari 42 unit	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan pemeliharaan dan perawatan mesin ketik menunjukkan komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjaga kondisi dan fungsi peralatan kerja agar tetap dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas perkantoran. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan mesin ketik sebagai salah satu sarana administrasi tetap terpelihara, berfungsi dengan baik, dan memiliki usia pakai yang lebih panjang. Pada tahap awal telah dilakukan pendataan dan identifikasi kondisi mesin ketik, pemeriksaan fungsi peralatan, serta penyiapan jadwal pemeliharaan dan perawatan guna memastikan kesiapan sarana administrasi perkantoran. Selanjutnya, hingga Triwulan II telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan mesin ketik secara berkala melalui pemeriksaan kondisi peralatan, pembersihan komponen, penyetelan bagian yang mengalami penurunan fungsi, serta pemantauan terhadap tingkat kelayakan penggunaan peralatan. Selain itu, dilakukan penataan dan inventarisasi mesin ketik guna memastikan keberadaan dan kondisi peralatan tetap terdata dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kegiatan administrasi perkantoran. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut bertujuan untuk menjaga keadaan peralatan sehingga tetap siap digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, kegiatan pemeliharaan dan perawatan mesin ketik telah berjalan secara tertib dan berkesinambungan serta mendukung terpeliharanya sarana administrasi perkantoran yang andal, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor Penghambat: Tidak ada kendala berarti, selisih dikarenakan efisiensi biaya pemeliharaan mesin ketik. Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjaga kondisi dan fungsi peralatan kerja guna mendukung kelancaran operasional perkantoran 2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antarunit kerja dalam proses identifikasi dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin 3. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan dan pemeliharaan peralatan kerja perkantoran

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4. Ketersediaan anggaran yang mendukung kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5. Perencanaan kebutuhan pemeliharaan yang dilakukan secara terstruktur sesuai kondisi dan fungsi peralatan kerja 6. Terealisasinya pemeliharaan mesin ketik sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran administrasi perkantoran 7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor 8. Dukungan tata kelola administrasi yang tertib dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan aset peralatan kantor 9. Monitoring dan evaluasi kondisi peralatan secara berkala guna menjaga kualitas, fungsi, dan usia pakai peralatan kerja 10. Lingkungan kerja yang mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas administrasi serta operasional perkantoran
2.6.5	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.060.000	40,2	40,2	0	5.624.000	40	5.040.000	35,85	4,15	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 menjadi bukti sekaligus testimoni bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,32 dengan kategori mutu pelayanan 4 (Cukup). menunjukkan bahwa kinerja pelayanan dinilai memuaskan, baik dari aspek persyaratan, prosedur, biaya layanan, kualitas produk layanan, perilaku petugas, hingga sarana dan prasarana. Tingginya penilaian masyarakat mencerminkan komitmen Biro Kesra DIY dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya tindak lanjut atas masukan dan evaluasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Biro Kesra DIY tidak hanya berorientasi pada capaian nilai, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil SKM ini dapat menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Biro Kesra DIY telah memperoleh kepercayaan dan apresiasi positif dari masyarakat.	https://drive.google.com/file/d/1-adz-Bs6Pjxf0RgZlIKt3nmpfTxDr/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Mental Spiritual - Subbagian Tata Usaha	1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : 7 unit dari 20 unit	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya menunjukkan komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjaga kualitas sarana dan prasarana perkantoran agar tetap berfungsi dengan baik serta mendukung kenyamanan lingkungan kerja. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan fasilitas gedung kantor dapat digunakan secara optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan pemeliharaan AC sebagai bagian dari pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor, sehingga kenyamanan dan kelayakan ruang kerja dapat terjaga dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor Penghambat: 1. Adanya hewan pengerat yang sulit dikendalikan atau dibasmi. 2. Perbedaan antara anggaran dan harga perolehan jasa pemeliharaan AC menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan realisasi biaya pemeliharaan yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan tetap akuntabel tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan pemeliharaan AC. Faktor Pendukung: 1. Ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan pemeliharaan AC kantor sesuai kebutuhan operasional perkantoran 2. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan AC secara teknis 3. Koordinasi dan komunikasi yang baik antarunit kerja dalam identifikasi kebutuhan serta penjadwalan pemeliharaan AC 4. Ketersediaan data kondisi dan riwayat pemeliharaan AC sebagai dasar pelaksanaan perawatan yang tepat 5. Dukungan sarana dan prasarana pemeliharaan yang memadai sehingga perbaikan dan perawatan AC dapat dilaksanakan dengan optimal
3	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.471.391.500	96,8	96,8	0	22.712.910.150	96,77	22.510.085.087	95,9	0,87						
3.1	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	22.894.463.700	98,42	98,42	0	22.530.057.700	98,41	22.330.072.408	97,53	0,88						
																	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisk			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.1.1	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	20.080.530.450	99,89	99,89	0	20.055.310.450	99,87	20.019.523.704	99,7	0,17	Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan oleh Bapak Dwi Suranto, selaku Ketua Takmir Masjid Al-Iman, Gabusan, Sewon, Bantul, kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY. Apresiasi tersebut diberikan atas penyaluran bantuan hibah rumah ibadah senilai Rp25.000.000,- yang telah direalisasikan dengan baik. Bantuan stimulan tersebut telah dialokasikan secara optimal untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang ibadah, meliputi 4 unit pendingin ruangan (AC) serta 5 unit meja beserta kain penutupnya. Fasilitas baru ini dinilai sangat berdampak positif dalam meningkatkan kenyamanan jemaah serta mendukung kelancaran berbagai aktivitas peribadatan dan kegiatan keagamaan di Masjid Al-Iman.	https://drive.google.com/file/d/17fipb8f-a5XoBnPLuEgsI2j5uOoZlU/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT - Bagian Bina Mental Spiritual	1. Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola : 795 unit dari 796 unit	Tertindakannya sosialisasi dan fasilitasi pemberkasan hibah rumah ibadah sebagai bagian dari rangkaian persiapan penyaluran hibah Tahun 2026. Kegiatan meliputi penyampaian mekanisme pengajuan, verifikasi dan kelengkapan administrasi, pendampingan pemberkasan, serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses penyaluran hibah berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Selanjutnya, pada Triwulan I Tahun 2026 telah terlaksana pencairan hibah rumah ibadah Tahap I kepada 238 titik penerima. Adapun untuk sisa sebanyak 558 titik penerima, pencairan dilakukan secara bertahap. Dalam rangka mendukung kelancaran proses tersebut, sejak bulan April 2026 telah terlaksana persiapan pencairan Tahap II melalui proses koordinasi, verifikasi administrasi, dan penyempurnaan dokumen pendukung pencairan hibah. Sebagai keberlanjutan dari tahapan persiapan tersebut, pada bulan Mei 2026 telah direalisasikan pencairan hibah tempat ibadah Tahap II yang mencakup sebanyak 534 tempat ibadah. Dengan demikian, pada akhir bulan Mei 2026 masih terdapat sebanyak 24 tempat ibadah yang belum disalurkan dan akan diproses pada tahapan berikutnya agar seluruh penyaluran dapat berjalan lancar sesuai dengan target yang telah direncanakan. Selanjutnya, pada bulan Juni 2026 telah dilaksanakan penyelesaian proses verifikasi dan pemenuhan dokumen administrasi terhadap sisa penerima hibah, sehingga pencairan kepada 24 tempat ibadah yang belum tersalurkan dapat direalisasikan secara penuh. Dengan terselesaikannya proses tersebut, maka seluruh penyaluran hibah rumah ibadah Tahun 2026 telah mencapai 796 titik penerima dan seluruh penerima hibah rumah ibadah telah menerima penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah serta mewujudkan tata kelola penyaluran hibah yang tertib, akuntabel, dan tepat sasaran. Faktor Penghambat: 1. Banyaknya jumlah penerima hibah yang menyebabkan proses verifikasi dan pencairan dilakukan secara bertahap. 2. Kebutuhan kelengkapan administrasi yang beragam sehingga memerlukan waktu lebih dalam proses penyempurnaan dokumen. 3. Dinamika kesiapan administrasi di tingkat penerima hibah yang belum seluruhnya seragam, sehingga perlu pendampingan intensif. 4. Proses penyesuaian dan verifikasi dokumen yang memerlukan ketelitian tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 5. Terdapat rekening penerima hibah yang sudah tidak aktif, proses pencairan dana hibah diprioritaskan terlebih dahulu kepada penerima yang memiliki rekening aktif. Adapun pencairan dana hibah bagi penerima dengan rekening yang tidak aktif akan dilakukan setelah proses aktivasi atau pembaruan rekening selesai, dan direncanakan untuk direalisasikan pada bulan Juni. Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung penyaluran hibah rumah ibadah secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. 2. Koordinasi dan sinergi yang baik dengan penerima hibah serta pihak terkait dalam proses sosialisasi, verifikasi, dan pemberkasan administrasi. 3. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, dan verifikasi dokumen hibah. 4. Tersedianya data dan mekanisme administrasi yang jelas sebagai dasar pelaksanaan pencairan hibah secara bertahap. 5. Kesiapan sistem dan proses kerja yang terstruktur dalam mendukung pencairan hibah Tahap I dan persiapan Tahap II.
																1. BAZNAS DIY : 1 Lembaga dari 1 Lembaga 2. MUI DIY : 1 Lembaga dari 1 Lembaga 3. PW Muhammadiyah DIY : 1 Lembaga dari 1 Lembaga 4. PW NU DIY : 1 Lembaga dari 1 Lembaga 5. Kevikepan DIY : 1 Lembaga dari 1 Lembaga	Tahapan pekerjaan (Fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya pemberangkatan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2026 sebanyak 21 petugas melalui skema sinergi pendanaan antara Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji serta pelayanan kepada jamaah haji asal Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, telah terlaksana fasilitasi hibah kepada kelembagaan keagamaan di DIY sebagai upaya mendukung penguatan peran organisasi keagamaan dalam pembinaan umat, pelayanan sosial keagamaan, peningkatan kerukunan antarumat beragama, serta penguatan kehidupan spiritual dan sosial masyarakat. Fasilitasi hibah diberikan kepada kelembagaan keagamaan tingkat daerah meliputi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), PW Muhammadiyah, PW Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Kevikepan DIY. Selanjutnya, pada bulan Mei telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung guna menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan keagamaan, meliputi penyiapan seragam Petugas Haji Daerah DIY sebagai bagian dari persiapan operasional petugas haji, rapat koordinasi penyusunan draf Keputusan Gubernur tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagai langkah penguatan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan pesantren di DIY, serta rapat koordinasi pengiriman Petugas Haji Daerah DIY. Selain itu, telah dilaksanakan pencetakan dan pengandaan dokumen pendukung kegiatan penyelenggaraan haji serta dokumen kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pesantren guna mendukung kelancaran administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisk			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.1.2	4.01.04.1.01.0002	Facilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.813.933.250	87,97	87,97	0	2.474.747.250	87,95	2.310.548.704	82,11	5,84	kegiatan tahunan dari Biro Kesejahteraan Pemda DIY melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesar) Setda DIY. Apresiasi tersebut diberikan atas penyaluran bantuan hibah lembaga keagamaan tahun anggaran 2025 senilai Rp50.000.000,- yang telah diterima melalui Bank BPD DIY pada 12 Maret 2026. Sebagai lembaga perskutuan umat beriman Kristiani yang menjalankan pelayanan pastoral gerejawi di bawah otoritas Keuskupan Agung Semarang di wilayah DIY, Kevikepan DIY telah merealisasikan bantuan stimulan tersebut secara optimal untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor sekretariat. Adapun alokasi fungsional dari bantuan hibah yang telah terealisasi meliputi: - 1 unit TV LED beserta bracket dan 1 unit AC 1 PK yang telah terpasang guna meningkatkan fasilitas ruang kerja kantor sekretariat. - 1 unit laptop untuk optimalisasi manajemen administrasi dan operasional perkantoran. - 2 unit telepon genggam sebagai sarana komunikasi koordinasi internal dan eksternal Kevikepan. - 2 unit webcam yang disiapkan untuk menunjang kebutuhan pelayanan, koordinasi, dan program pastoral secara daring (online). Pihak Kevikepan menyatakan bahwa bantuan ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, komunikasi, serta kelancaran pelaksanaan berbagai program pastoral di wilayah DIY. Sinergi yang baik ini diharapkan dapat terus terjalin demi mewujudkan kehidupan masyarakat Yogyakarta yang harmonis, sejahtera, toleran, dan berkeadaban.	https://drive.google.com/file/d/135Qg3RrSDUyl2g7qkP8elzBvUqYET6Z/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT - Bagian Bina Mental Spiritual	6. PGI DIY : 1 Lembaga dari 1 Lembaga 7. PHDI DIY : 1 Lembaga dari 1 8. WALUBI DIY : 1 Lembaga dari 1 Lembaga 9. HAJI : 1 Lembaga dari 1 Lembaga 10. Fasilitas Pesantren : Lembaga dari 1 Lembaga 11. Hibah Lembaga : 9 Lembaga dari 10 Lembaga	Memasuki bulan Juni 2026, telah dilaksanakan pemberangkatan Petugas Haji Daerah DIY ke Arab Saudi untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan pelayanan kepada jamaah haji asal Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, telah dilaksanakan fasilitas embarkasi dan debarkasi haji sebagai bagian dari dukungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memastikan kelancaran proses keberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Kegiatan fasilitasi tersebut meliputi koordinasi dengan instansi terkait, pendampingan proses pelayanan jamaah, serta dukungan penyelenggaraan operasional embarkasi dan debarkasi guna mewujudkan pelayanan haji yang tertib, aman, dan nyaman bagi jamaah haji asal DIY. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan urusan keagamaan telah berjalan secara bertahap dan berkesinambungan melalui dukungan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, fasilitasi kelembagaan keagamaan, serta penguatan kebijakan di bidang keagamaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor Penghambat: 1. Keterbatasan waktu persiapan keberangkatan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2026 yang menuntut proses administrasi, verifikasi, dan penetapan dilakukan secara cepat dan tepat. 2. Efisiensi anggaran terjadi karena adanya selisih pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) serta efisiensi pada anggaran bantuan kloter dan uang saku Petugas Haji Daerah yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema sharing pendanaan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Selebihnya efisiensi dikarenakan adanya perbedaan harga perolehan dan SHBI. Faktor Pendukung: 1. Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui fasilitasi pemberangkatan Petugas Haji Daerah secara terencana dan terkoordinasi. 2. Sinergi pendanaan antara Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperkuat dukungan pembiayaan dan kelancaran pemberangkatan petugas haji. 3. Koordinasi yang efektif antara Biro Kesejahteraan Rakyat dengan instansi terkait dalam proses persiapan, verifikasi, dan pemberangkatan Petugas Haji Daerah. 4. Ketersediaan dukungan kelembagaan keagamaan yang kuat dan aktif dalam pelaksanaan fasilitasi hibah, sehingga memperlancar proses penyaluran bantuan. 5. Tersedianya data dan mekanisme administrasi yang jelas dalam penetapan petugas haji maupun penerima hibah kelembagaan keagamaan. 6. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan administrasi, verifikasi, dan pengelolaan hibah serta pemberangkatan Petugas Haji Daerah.
3.2	4.01.04.1.02	Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	374.771.600	26,12	26,12	0	94.229.450	25,14	92.525.998	24,69	0,45						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.2.1	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	70.319.750	17,23	17,23	0	11.890.050	16,91	10.290.050	14,63	2,28	Apresiasi dan tanggapan positif disampaikan oleh pihak sekolah atas kunjungan pelaksanaan survei pemetaan kemampuan dasar siswa yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah DIY. Kepala SMK Muhammadiyah Prambanan, Bapak Sigit Rohmadiantoro, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada tim dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY atas terselenggaranya kegiatan survei literasi dan numerasi tersebut. Pihak sekolah menyatakan sangat terbantu dengan adanya pemetaan ini. Langkah ini dinilai sangat strategis dalam upaya mengukur, mengevaluasi, sekaligus menyusun metode peningkatan kemampuan literasi serta numerasi, baik bagi para siswa maupun tenaga pendidik (guru) di lingkungan SMK Muhammadiyah Prambanan. Melalui sinergi ini, diharapkan hasil survei dapat menjadi landasan kuat untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan dan capaian literasi-numerasi secara signifikan, baik di lingkup internal sekolah maupun secara vertikal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.	https://drive.google.com/file/d/1hz23ndo-po7yzIMdIr1kIBXXmL2O9Bckp/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Kajian Strategi Pengembangan Media Belajar dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Numerasi Siswa : dokumen dari 1 dokumen 2. Koordinasi Sinkronisasi Tim Pembina UKS/M : dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya fungsi sekretariat Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui koordinasi secara berkelanjutan pada bulan Januari hingga April 2026 dengan fokus pada penguatan keterlibatan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung ketersediaan dan pasokan bahan baku makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terlaksananya persiapan kajian penguatan intervensi literasi dan numerasi berbasis sekolah pada bulan April 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan kapasitas belajar peserta didik. Langkah ini ditindaklanjuti pada bulan Mei 2026 melalui Focus Group Discussion (FGD) Awal Kajian Strategi Peningkatan Nilai Literasi dan Numerasi pada Siswa Tingkat Pendidikan Menengah di DIY yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2026 di Ruang Wisanggeni, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Kegiatan FGD awal tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan kajian untuk mengidentifikasi kondisi, tantangan, serta alternatif strategi kemampuan peserta didik. Terlaksananya rangkaian kunjungan lapangan dalam rangka Kajian Strategi Pengembangan Media Belajar untuk Meningkatkan Literasi dan Numerasi Siswa pada bulan Juni 2026. Kunjungan kerja dan studi lapangan ini menysaar beberapa wilayah dan satuan pendidikan strategis, meliputi wilayah Kabupaten Kulon Progo, SMK N 1 Girisebo dan SMAN 1 Hongkop di Kabupaten Gunungkidul, serta SMA Kesatuan Bangsa di Kabupaten Bantul dan SMK Muhammadiyah 2 Wates di Kabupaten Kulon Progo. Terlaksananya inventarisasi data dan permasalahan dari hasil kunjungan lapangan tersebut sebagai bahan evaluasi objektif mengenai kondisi literasi dan numerasi siswa tingkat pendidikan menengah di DIY. Data yang dihimpun kemudian ditindaklanjuti secara intensif melalui penyelenggaraan FGD Awal lanjutan serta FGD Penyempurnaan Draf Kajian Strategi Peningkatan Nilai Literasi dan Numerasi pada Siswa Tingkat Pendidikan Menengah di DIY. Terlaksananya proses penyempurnaan draf Kajian Strategi Peningkatan Nilai Literasi dan Numerasi pada Siswa Tingkat Pendidikan Menengah di DIY berdasarkan masukan dan data komprehensif yang diperoleh selama bulan Juni. Seluruh rangkaian aktivitas matang ini dipastikan terus berjalan secara berkesinambungan hingga semester II 2026 guna menghasilkan rekomendasi kebijakan dan program final yang aplikatif demi peningkatan kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor Penghambat: Salah satu narasumber sedang berada di Cina, sehingga FGD dilaksanakan dalam format hybrid. Meskipun berjalan lancar, kualitas peralatan untuk hybrid cenderung terbatas, sehingga dalam beberapa kesempatan suara dari peserta luring kurang terdengar pada zoom.	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Selebihnya selisih pembelanjaan dikarenakan adanya perbedaan harga perolehan dengan SHBU. Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung penguatan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang pendidikan melalui koordinasi lintas sektor. 2. Terbangunnya koordinasi yang berkelanjutan dengan Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MSG) dalam mendukung pelaksanaan fungsi sekretariat secara efektif. 3. Dukungan data dan informasi yang memadai sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan. 4. Kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan fasilitasi, kajian, serta penguatan intervensi literasi dan numerasi berbasis sekolah. 5. Dukungan jejaring dan kolaborasi antarinstansi dalam perencanaan kajian penguatan literasi dan numerasi pada sektor pendidikan. 6. Tersedianya kerangka kerja dan arah kebijakan yang jelas dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi, sinkronisasi, dan evaluasi capaian kinerja bidang pendidikan.
																1. Kajian Kebijakan Stunting Hidup Sehat : dokumen dari 1 dokumen 2. Rakorda Kebijakan Gerakan Masyarakat : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa DIY : dokumen dari 1 dokumen 4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan: Terlaksananya koordinasi pembahasan kajian bidang kesehatan dan penguatan kemitraan kesehatan sepanjang Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran proses koordinasi, penguatan jejaring kerja sama, dan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Kegiatan ini mencakup pembahasan berbagai isu strategis kesehatan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta upaya peningkatan kualitas program kesehatan berbasis masyarakat dan kemitraan. Pada awal Tahun 2025 juga telah terlaksana Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan tema pencegahan HIV/AIDS. Kegiatan ini berfokus pada penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung pencapaian target 3 Zero HIV/AIDS di DIY, serta transformasi layanan kesehatan menuju layanan terpadu mulai dari Puskesmas hingga Rumah Sakit sesuai regulasi terbaru. Selain itu, pada Triwulan I Tahun 2026 telah terlaksana persiapan Kajian Stunting sebagai bagian dari upaya penguatan intervensi penanganan stunting berbasis data dan koordinasi lintas sektor. Selanjutnya, telah terlaksana 4 (empat) kali sosialisasi penanganan permasalahan kesehatan berbasis masyarakat, termasuk tema HIV/AIDS, sebagai bentuk peningkatan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan kesehatan secara berkelanjutan. Pada bulan April 2026 juga telah terlaksana persiapan lanjutan Kajian Stunting guna mendukung penyusunan rekomendasi dan penguatan program kesehatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.2.2	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	196.907.400	26,9	26,9	0	49.727.700	25,25	49.634.421	25,21	0,04	Apresiasi terhadap sinergi lintas sektor disampaikan oleh Ketua Tim Kajian Stunting DIY, Ibu Dewi Handayani, atas dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan riset penanganan stunting. Pihak tim kajian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY atas fasilitasi dan kolaborasi yang berjalan sangat baik sepanjang proses penelitian. Berkat dukungan dari Biro Kesra Setda DIY, tim kajian berhasil mengakses data komprehensif yang akurat langsung dari lapangan. Kelancaran proses ini juga didukung oleh fasilitasi koordinasi ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Puskesmas, hingga instansi di tingkat kelurahan. Output dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif, sehingga dapat diimplementasikan secara nyata dalam penyusunan perencanaan program kerja daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Sinergi yang solid ini diharapkan dapat terus dikembangkan guna mengoptimalkan efektivitas program penurunan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan.	https://drive.google.com/file/d/1n8gI4BRk6GA_wTQFIUbCnN1tcvNr7mS/view?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kab/ Kota : dokumen dari 1 dokumen	Pada bulan Mei 2026, telah terlaksana pembuatan video panduan pengisian matriks Rencana Aksi Daerah Kesehatan Jiwa (RAD Keswa) sebagai sarana pendukung peningkatan pemahaman dan keseragaman pelaksanaan pengisian matriks oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, telah dilakukan pengajuan Surat Keputusan Tim Koordinasi Daerah Zoonosis kepada Gubernur DIY sebagai langkah penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. Dalam rangka penyusunan Kajian Stunting, juga telah terlaksana Focus Group Discussion (FGD) awal yang melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan, identifikasi permasalahan, serta penguatan data dan informasi sebagai dasar penyusunan kajian. Selanjutnya, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman terkait pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan program Kesehatan Jiwa (Keswa) guna memastikan efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan. Sebagai bagian dari implementasi program promotif dan preventif kesehatan, hingga Triwulan II Tahun 2026 juga telah terlaksana koordinasi dengan Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Senam Jumat Pagi di Komplek Kepatihan. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin sebagai upaya membudayakan aktivitas fisik, meningkatkan kebugaran jasmani aparaturnya dan masyarakat, serta mendukung implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Selain itu, telah dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis di Komplek Kepatihan yang meliputi pemeriksaan kesehatan dasar sebagai bentuk deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pada periode yang sama juga telah terselenggara kegiatan Aksi Donor Darah yang bekerja sama dengan instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap ketersediaan stok darah sekaligus mendorong partisipasi aktif aparaturnya dan masyarakat dalam kegiatan sosial kemanusiaan yang Memasuki bulan Juni 2026, telah dilaksanakan persiapan lanjutan Kajian Stunting melalui pengumpulan dan penelaahan data pendukung, koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta penyempurnaan bahan kajian dan instrumen pendukung sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan penanganan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas kajian berbasis data dan memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Dengan demikian, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan koordinasi pembahasan kajian bidang kesehatan dan penguatan kemitraan kesehatan telah berjalan secara bertahap dan berkesinambungan. Selain menghasilkan berbagai forum koordinasi, kajian, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kebijakan kesehatan, kegiatan ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan aktivitas promotif dan preventif berupa Senam Jumat Pagi, pemeriksaan kesehatan gratis, dan Aksi Donor Darah di Komplek Kepatihan. Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut mendukung peningkatan sinergi lintas sektor, penguatan kemitraan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dan program kesehatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor Penghambat: 1. Terdapat efisiensi anggaran yang disebabkan oleh selisih antara harga perolehan pembelian alat tulis kantor dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHB), sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan akuntabel. 2. Belum tersedianya anggaran apresiasi bagi peserta FGD maupun pihak yang terlibat sebagai responden, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan kajian. Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung penguatan kebijakan kesehatan melalui fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor. 2. Terjalannya sinergi yang kuat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan kesehatan dalam pelaksanaan Germas dan penanganan isu kesehatan prioritas. 3. Dukungan data dan informasi kesehatan yang memadai sebagai dasar pelaksanaan kajian, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti. 4. Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam kemitraan kesehatan, termasuk fasilitas layanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan lintas sektor terkait. 5. Kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan koordinasi, kajian, serta fasilitasi program kesehatan masyarakat. 6. Dukungan kebijakan daerah yang sejalan dengan program nasional, seperti percepatan penanganan stunting dan pencegahan HIV/AIDS melalui pendekatan terpadu. 7. Efektivitas forum koordinasi seperti Rakorda Germas yang memperkuat sinergi lintas sektor dalam pencapaian target kesehatan daerah. 8. Tersedianya kerangka kerja dan mekanisme koordinasi yang jelas dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pengukuran capaian kinerja bidang kesehatan. 9. Tingginya komitmen dan partisipasi masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Stunting, baik melalui pemberian masukan, penyampaian informasi, maupun kontribusi sebagai narasumber dan responden bagi tim kajian.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisk			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	10. Terjalannya kerja sama yang baik antara tim kajian dengan Tim Kerja 1, yang ditunjukkan melalui sikap kooperatif dalam proses koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kajian stunting
3.2.3	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	107.544.450	30,52	30,52	0	32.611.700	30,32	32.601.527	30,31	0,01	Penerima manfaat menyampaikan bahwa pelaksanaan persiapan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi, serta pengukuran capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial telah memberikan manfaat dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan sosial yang lebih efektif, terarah, dan adaptif terhadap berbagai tantangan sosial yang berkembang di masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai mampu memperkuat proses pengelolaan data dan informasi, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, serta mendukung penyusunan bahan evaluasi yang diperlukan sebagai landasan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Di samping itu, penerima manfaat memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga yang mengangkat isu pencegahan berbagai permasalahan sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, judi online, dan game online yang berlebihan. Kegiatan sosialisasi tersebut dinilai berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam pencegahan permasalahan sosial, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan kondusif. Secara umum, keseluruhan rangkaian kegiatan dipandang memberikan dukungan yang signifikan terhadap penguatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.	https://drive.google.com/drive/folders/1a3q5Ow8lDVepwPaSKwPwXyCR58_mRqt?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Sosial : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisk) yang sudah dilakukan: Tertakannya persiapan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi, serta capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial menandai kesiapan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memastikan pelaksanaan kebijakan sosial berjalan terarah, terukur, dan responsif terhadap berbagai permasalahan di masyarakat. Persiapan ini mencakup pengumpulan data dan informasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta penyusunan bahan evaluasi sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif. Dalam mendukung kegiatan tersebut, juga telah terealisasi belanja serta pelaksanaan pertemuan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga dalam rangka pencegahan permasalahan sosial (narkoba, miras, judi online, dan game online), sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperkuat upaya pencegahan permasalahan sosial secara berkelanjutan. Tertakannya penyusunan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Rencana Aksi Daerah Lanjut Usia (RAD Lansia) pada bulan Mei 2026 menjadi bagian penting dari upaya penguatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan SK tersebut bertujuan untuk menetapkan perangkat pelaksana yang akan mendukung implementasi program dan kegiatan RAD Lansia secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan, sehingga pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, perlindungan, dan pemberdayaan lanjut usia dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Tertakannya rapat persiapan monitoring dan evaluasi (monev) koordinasi dan sinkronisasi (korsin) bahan rumusan kebijakan sosial pada bulan Juni 2026 menjadi langkah estafet berikutnya. Pertemuan ini difokuskan untuk menyelaraskan indikator evaluasi, memantapkan instrumen pemantauan di lapangan, serta menghimpun bahan masukan yang valid dari para pemangku kepentingan, guna memastikan seluruh kebijakan sosial yang dirumuskan tetap berjalan optimal dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Faktor Penghambat: Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan, dan seluruh anggaran telah dibelanjakan sesuai aliran kas serta kebutuhan yang telah direncanakan. Terdapat sedikit selisih anggaran pada pembelian alat tulis kantor yang disebabkan oleh perbedaan antara harga perolehan dengan Standar Harga barang dan jasa (SHB). Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung penguatan kebijakan sosial melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi secara berkelanjutan. 2. Sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3. Ketersediaan data, informasi, serta bahan evaluasi yang memadai sebagai dasar perumusan dan penguatan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial. 4. Dukungan sumber daya manusia serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengabdian, dan penguatan pencegahan permasalahan sosial secara terpadu.
3.3	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	202.156.200	43,85	43,85	0	88.623.000	43,84	87.486.681	43,28	0,56						
																	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Potensi Wirausaha Pemuda di DIY : dokumen dari 1 dokumen Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya persiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata menandai langkah awal Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memastikan keterpaduan program dan kegiatan lintas sektor yang mendukung pembangunan daerah. Persiapan ini mencakup pengumpulan data dan informasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta penyusunan bahan awal sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Triwulan II Tahun 2026 diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan forum diskusi bersama perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, budayawan, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut difokuskan pada identifikasi kondisi capaian setiap dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan, pemetaan tantangan dan potensi kebudayaan daerah, serta penyusunan langkah-langkah strategis dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung peningkatan nilai IPK DIY secara berkelanjutan. Terlaksananya pertemuan dan sosialisasi pelestarian seni dan adat tradisi hingga bulan Mei menjadi upaya nyata dalam memperkuat pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan. Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlaksananya keberlanjutan program tersebut pada bulan Juni ditegaskan melalui perluasan pelaksanaan Sosialisasi Pelestarian Seni dan Adat Tradisi. Agenda bulan Juni ini difokuskan untuk memperluas jangkauan edukasi serta memperdalam keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga akar budaya daerah, sekaligus memastikan instrumen kebijakan yang telah dirumuskan dapat terimplementasi secara nyata di lapangan.
3.3.1	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	133.157.000	50,81	50,81	0	67.649.700	50,81	66.535.140	49,97	0,84	Penguatan akurasi data sektor kebudayaan menjadi fokus utama dalam upaya mendorong capaian indeks pembangunan daerah. Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY terkait Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan dukungan penuh terhadap standarisasi data yang dihasilkan. Pihak BPS menyatakan bahwa melalui forum FGD ini, koordinasi tata kelola data dapat ditingkatkan agar lebih	https://drive.google.com/file/d/1e2E5sRVuAhtGrVTPYvUcn7SA_nQncpUuiew7uicnc/view	Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Risiko			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata									memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, yang mengedepankan aspek standarisasi dan akuntabilitas. ketika basis data yang dihasilkan telah memenuhi standar baku serta terjamin kualitasnya, intervensi kebijakan dan program kerja yang disajikan oleh pemerintah daerah akan menjadi jauh lebih tepat sasaran. Standardisasi ini memastikan bahwa setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta bertumpu pada data yang valid dan akurat.	haring		KESEJAHTERAAN RAKYAT		Melalui seluruh rangkaian kegiatan yang telah mencapai target terlaksananya program hingga bulan Juni ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan, memperkuat ekosistem kebudayaan daerah, serta meningkatkan kontribusi sektor kebudayaan terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkelanjutan. Faktor Penghambat: Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan, dan seluruh pembelanjaan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan. Namun perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan Indeks pembangunan kebudayaan di DIY. Pemilihan narasumber bergantung pada pihak eksternal (kegiatan sosialisasi) yang jika pemilihan narasumber berasal dari PNS Penda DIY maka tidak dapat dicairkan honor narasumber. Selebihnya efisiensi dikarenakan adanya perbedaan harga perolehan dan SHBI. Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendorong sinkronisasi kebijakan lintas sektor bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata secara terintegrasi. 2. Terjalinnnya koordinasi yang efektif dengan pemangku kepentingan terkait dalam proses perencanaan, sosialisasi, dan penguatan program pembangunan sektor terkait. 3. Ketersediaan data dan informasi yang memadai sebagai dasar penyusunan kebijakan, termasuk penguatan Indeks Pembangunan Kebudayaan. 4. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, serta fasilitasi kegiatan kebudayaan dan sosial kemasyarakatan. 5. Tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi strategi, dan sosialisasi pelestarian seni dan adat tradisi. 6. Adanya dukungan kelembagaan dan jejaring kerja sama lintas sektor yang memperkuat implementasi program kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan. 7. Kesiapan mekanisme kerja dan perencanaan yang terstruktur dalam mendukung pelaksanaan kegiatan secara terarah dan berkelanjutan. 8. Dukungan kebijakan daerah yang mendorong pelestarian budaya serta pengembangan sektor pariwisata sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat.	
																2. Terjadi koordinasi dengan tim Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Perlindungan Perempuan - dokumen dari 1	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Tahapan pekerjaan (fiskal) yang sudah dilakukan:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fiskal			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.3.2	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	68.998.300	30,41	30,41	0	20.973.300	30,4	20.951.532	30,37	0,03	Perumusan langkah strategis dalam perlindungan perempuan dan anak dari dampak pornografi mendapat dukungan penuh dari para praktisi. Selaku Tenaga Ahli Bidang Psikologi pada Kajian Pencegahan dan Penanganan Kasus Pornografi di DIY, Bapak Rendra Agusta menyampaikan apresiasi yang tinggi atas fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY. Sepanjang proses kajian berjalan, tim tenaga ahli sangat terbantu oleh peran aktif Biro Kesra serta Tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam penyediaan data, keterbukaan informasi, hingga perumusan strategi penanganan. Dukungan fasilitas yang suportif di dalam forum berhasil menstimulasi perumusan draf Rencana Aksi Daerah (RAD) secara komprehensif dan implementatif. Mengingat kompleksitas penanganan kasus pornografi yang memerlukan pendekatan multisektor (pentahelix), hasil kajian ini menekankan pentingnya sinergi lintas kelompok guna memutus mata rantai kasus, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak. Pihak tenaga ahli berharap komitmen dan insight yang telah diakomodasi oleh Biro Kesra Setda DIY dapat segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan lingkungan DIY yang aman dan inklusif.	https://drive.google.com/file/d/1Hk6i19pQ4tEgLBwKfODVmiqf5fTNS/view?usp=s_haring	Daerah Istimewa Yogyakarta	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	2. Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : dokumen dari 1 dokumen 3. Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat : dokumen dari 1 dokumen	Tertindakannya persiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, serta tenaga kerja menandai kesiapan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memastikan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persiapan ini mencakup pengumpulan data dan informasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta penyusunan bahan awal sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Dalam mendukung kegiatan tersebut, juga telah terealisasi belanja terkait kebijakan bidang KB-KS dan pengendalian penduduk serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA), serta telah dilaksanakan koordinasi penyusunan kajian pencegahan dan penanganan pornografi di DIY, sehingga diharapkan dapat memperkuat implementasi program serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Tertindakannya Focus Group Discussion (FGD) Akhir Kajian Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada Perempuan dan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Mei 2026 menjadi kelanjutan penting dari rangkaian penyusunan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan FGD akhir ini bertujuan untuk memperoleh masukan, penyempurnaan substansi, serta validasi hasil kajian dari para pemangku kepentingan terkait guna menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Tertindakannya kelanjutan koordinasi dan pembahasan intensif terkait FGD Akhir Kajian Pencegahan dan Penanganan Pornografi Pada Perempuan dan Anak di DIY pada bulan Juni 2026. Agenda bulan Juni ini difokuskan pada tahap finalisasi draf kajian dengan mengintegrasikan seluruh masukan strategis pasca-FGD, guna memastikan dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar matang dan siap diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor Penghambat: Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan, dan seluruh anggaran telah dibelanjakan sesuai aliran kas serta kebutuhan yang telah direncanakan. Terdapat sedikit selisih anggaran pada pembelian alat tulis kantor yang disebabkan oleh perbedaan antara harga perolehan dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Faktor Pendukung: 1. Komitmen Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan terkait dalam proses perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 3. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan data, koordinasi, dan penyusunan bahan kebijakan lintas sektor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisk			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	4. Ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan bidang terkait lainnya 5. Ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta penyusunan kajian strategis 6. Terealisasinya belanja terkait kebijakan bidang KB-KS, pengendalian penduduk, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) 7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kajian pencegahan dan penanganan pornografi di DIY sebagai upaya penguatan kebijakan perlindungan masyarakat 8. Sinergi antarperangkat daerah dan lembaga terkait dalam mendukung implementasi program kesejahteraan rakyat secara terpadu 9. Perencanaan kegiatan yang terstruktur sehingga proses koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan bahan kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat waktu 10. Dukungan tata kelola administrasi yang tertib serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan
Jumlah			26.303.702.200	93,36	93,36		24.543.838.050	93,31	24.165.400.791	91,87							